

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2021-2026**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
JL. KOTO TINGGI NO.9 PADANG**

PADANG, MARET 2022



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTOTINGGI No. 9

PADANG

Kode Pos 25 128

Telp . (0751) 841584 (Kepala)
(0751) 27089 (Sekretariat)
(0751) 33288 (umum)
Fax. (0751) 27089

Kotak Pos . 42

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 74 /SK-DKP.10.1/III/2022

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 28 Maret 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat



Dr.Ir.DESNIARTI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199003 2 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Peringgal

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN
 DINAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN PROVINSI
 SUMATERA BARAT
 NOMOR : 74/SK-DKP.10.1/III/2022
 TANGGAL : 28 Maret 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 TAHUN 2021 -2026**

- 1. Nama OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 2. Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi**
- 3. Fungsi : 1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan
 2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan
 3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan
 4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan
 5. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya**

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2021)	RUMUSAN/FORMULA PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	6	7	
I	Meningkatnya Pendapatan					
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.19	$\frac{\text{Prod. tangkap sekarang} - \text{Prod. Th lalu}}{\text{Produksi Th lalu}} \times 100 \%$ <p>Merupakan perhitungan besarnya penghitungan produksi perikanan tangkap (produksi peerairan laut + perairan umum). Produksi perikanan tangkap tahun 2022 didominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu : tongkol, teri, tuna, kerapu dan lain-lain.</p>	BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR	BIDANG PERIKANAN TANGKAP

2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	5,51	$\frac{\text{Prod. bddy sekarang} - \text{Prod. Th lalu}}{\text{Produksi Th lalu}} \times 100 \%$ <p>Merupakan penghitungan besarnya penghitungan produksi perikanan budidaya. Data produksi ini diperoleh dari perhitungan produksi di masing-masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.</p>	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
3	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	230,62	<p>Jumlah ekspor hasil perikanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Data hasil ekspor perikanan ini diperoleh dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang dan Pengumpul yang ada di 7 Kabupaten/Kota Pesisir pantai Provinsi Sumatera Barat. Data dari pengumpul berasal dari Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Untuk pengumpul yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mereka langsung menjual ke pengumpul di Kota Padang.</p>	BIDANG PDSKP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR	BIDANG PDSKP
4	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan		$\frac{\text{Prod. olahan sekarang} - \text{Prod. Th lalu}}{\text{Produksi Th lalu}} \times 100 \%$ <p>Merupakan penghitungan besarnya penghitungan produksi olahan hasil perikanan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya yaitu produksi tahun yang dievaluasi dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun lalu (sebelumnya) dikali 100%.</p>	BIDANG PDSKP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR	BIDANG PDSKP
5	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil	37,24	<p>Perhitungan efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan rumusan untuk level pengelolaan.</p> <p>1. Skor penilaian kinerja input : 280 dari total skor 1075. 2. Skor penilaian kinerja proses : 160 dari total</p>	Bidang PRL & PSDKP, UPTD KPSDKP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.SUMBAR	Bidang PRL & PSDKP

			<p>skor 430.</p> <p>3. Skor penilaian kinerja outcome : 305 dari total skor 625 dengan jumlah skor penilaian : 1015.</p> <p>Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi terdiri atas tujuh kelompok tim yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2022.</p> <p>Penilaian diperoleh dari 5 kawasan konservasi daerah yaitu Selat Bunga Laut, KKD Pesisir Selatan, KKD Padang, KKD Pariaman dan KKP Batang Gasan Padang Pariaman.</p> <p>Nilai EVIKA yang diperoleh adalah 49,26% dengan Status dikelola Minimum.</p>	

Padang, 28 Maret 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat



Dr.Ir.DESNIARTI,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660824 199003 2 001